

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. *Latar Belakang*

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Gunungsitoli maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Kota Gunungsitoli.

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 – 2021 MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK MEMBERIKAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SEBAGAI TOLAK UKUR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN NASIONAL, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, KERUKUNAN ANTAR DAN INTRA SUKU - AGAMA DAN RAS, PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, SERTA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA. RENSTRA BERFUNGSI SEBAGAI PEDOMAN BIDANG-BIDANG TEKNIS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG SEJALAN DENGAN VISI DAN MISI SKPD.

1.2. *Landasan Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Gunungsitoli yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021;
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli;
3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, perencanaan dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.

Sasaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;

3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.

Fungsi Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021.

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kota Gunungsitoli di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli. Sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah, Badan Kesbangpol adalah Unsur Pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Pembinaan Politik dan Kewaspadaan dini Daerah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan daerah di bidang kesatuan bangsa, pembinaan politik dan Kewaspadaan dini daerah;
2. Pengkoordinasian tugas dan fungsi pemerintah kota di bidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik dan Kewaspadaan dini daerah;
3. Pelaksanaan tugas dan urusan pemerintah kota di bidang kesatuan , pembinaan politik dan Kewaspadaan dini daerah;

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, membawahi beberapa sub bagian antara lain :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ideologi dan Ketahanan Kebangsaan, membawahi beberapa sub bidang antara lain :
 - a. Kepala Sub Bidang Ideologi Negara dan wawasan Kebangsaan.

- b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
- 4. Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahi beberapa sub bidang antara lain :
 - a. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
 - b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga Asing.
- 5. Bidang Politik dalam Negeri, membawahi beberapa sub bidang antara lain :
 - a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum.
 - b. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Politik.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

I. KEPALA BADAN

TUGAS POKOK:

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI DAERAH

FUNGSI :

- 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI DAERAH**
- 2. PENGKOORDINASIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KOTA DI BIDANG KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI DAERAH**
- 3. PELAKSANAAN TUGAS DAN URUSAN PEMERINTAH KOTA DI BIDANG KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI DAERAH.**

II. SEKRETARIS BADAN

TUGAS POKOK :

MELAKSANAKAN KOORDINASI, PELAKSANAAN DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN.

FUNGSI :

1. PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN.
2. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.
3. PENYELENGGARAAN URUSAN UMUM DAN PERLENGKAAN, KEPROTOKOLAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT.
4. PENYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.
5. PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT KERJA.

III. BIDANG IDEOLOGI DAN KETAHANAN KEBANGSAAN

TUGAS POKOK :

MELAKSANAKAN TUGAS POKOK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBAURAN BANGSA, IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

FUNGSI :

1. PENGUMPULKAN, KLARIFIKASI, MENGOLAH DAN MENYUSUN BAHAN PEMBAURAN BANGSA, IDEOLOGI, PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA.
2. PELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBAURAN ANTAR SESAMA.
3. PELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGALAMAN IDEOLOGI.
4. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN, REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA.
5. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENDATAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.

IV. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAERAH

TUGAS POKOK :

MENYELENGGARAKAN TUGAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KEWASPADAAN DINI, DAN PENANGANAN KONFLIK, KERJA SAMA INTELIJEN DAERAH DAN PENDATAAN ORANG ASING DAN KETAHANAN BANGSA.

FUNGSI :

1. PENGKOORDINASIAN, MENGATUR DAN MEMBINA KERJASAMA BIDANG KETAHANAN DAN KEWASPADAAN DINI.
2. PENYUSUNAN BAHAN / PETUNJUK PELAKSANAAN KETAHANAN DAN KEWASPADAAN DINI, PENANGANAN KONFLIK DAN KERJA SAMA INTELIJEN DAERAH
3. MELAKSANAKAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN DAN KEWASPADAAN DINI, PENANGANAN KONFLIK DAERAH, KERJA SAMA INTELIJEN

V. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

TUGAS POKOK :

MENYELENGGARAKAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI.

PELAKSANAAN KEGIATAN BINA PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM.

FUNGSI :

1. MENGUMPULKAN, MENGLARIFIKASIKAN, MENGOLAH DAN MENYUSUN BAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN BINA POLITIK DALAM NEGERI.
2. MENYUSUN PEDOMAN ATAU PETUNJUK PELAKSANAAN BINA POLITIK DALAM NEGERI, DAN PEMILIHAN UMUM.
3. MELAKSANAKAN BINA POLITIK DALAM NEGERI.

VI. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAERAH

TUGAS POKOK :

MENYELENGGARAKAN TUGAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KEWASPADAAN DINI, DAN PENANGANAN KONFLIK, KERJA SAMA INTELIJEN DAERAH DAN PENDATAAN ORANG ASING DAN KETAHANAN BANGSA.

FUNGSI :

4. MELAKSANAKAN KOORDINASI, MENGATUR DAN MEMBINA KERJASAMA BIDANG KETAHANAN DAN KEWASPADAAN DINI
5. MENYUSUN BAHAN / PETUNJUK PELAKSANAAN KETAHANAN DAN KEWASPADAAN DINI, PENANGANAN KONFLIK DAN KERJA SAMA INTELIJEN DAERAH
6. MELAKSANAKAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN DAN KEWASPADAAN DINI, PENANGANAN KONFLIK DAERAH, KERJA SAMA INTELIJEN

UNTUK MENJABARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI ATAS, MAKA MASING – MASING JABATAN DAPAT DI RINCI URAIAN TUGASNYA UNTUK MENJADI ACUAN, PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-HARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI, BAIK OLEH PEJABAT STRUKTURAL MAUPUN OLEH SELURUH STAF, SEBAGAI MANA DI BAWAH INI :

I. RINCIAN TUGAS KEPALA BADAN :

1. MEMBANTU KEPALA DAERAH MELALUI SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS BIDANG KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. MEMBANTU KEPALA DAERAH MELALUI SEKRETARIS DAERAH DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
3. MENGKOORDINIR HUBUNGAN KERJA ANTAR BIDANG / SEKRETARIAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI.
4. MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT PROVINSI, KOTA DAN INSTANSI VERTIKAL BERKAITAN DENGAN TUGAS – TUGAS PEMBINAAN KESATUAN BANGSA, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MITRA KERJA KOTA GUNUNGSITOLI.
5. MENGKOORDINIR PENYELENGGARAAN KERJA SAMA, MONITORING DAN EVALUASI DI BIDANG TUGAS PEMBINAAN KESATUAN BANGSA, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KEWASPADAAN DINI DENGAN INSTANSI TERKAIT SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.
6. MENGKOORDINIR PENGAWASAN LANGSUNG DAN PENGENDALIAN SELURUH KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI.
7. MELAKSANAKAN PEMBINAAN, MENGARAHKAN DAN MEMOTIFASI PARA STAF SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
8. MENGKOORDINIR PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI KOTA GUNUNGSITOLI.

9. **MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI TERHADAP URUSAN RUMAH TANGGA BADAN KESATUA BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI KOTA GUNUNGSITOLI.**
10. **MENGKOORDINIR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI KEUANGAN RUTIN MAUPUN PROYEK / KEGIATAN YANG DI KELOLA BADAN KESATUA BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI KOTA GUNUNGSITOLI.**
11. **MENGKOORDINIR PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK, PELAKSANAAN DEMOKRATISASI, KEGIATAN PEMILU SERTA PEMANTAUAN TERHADAP MASAHAH AKTUAL DI KOTA GUNUNGSITOLI.**
12. **MEMBAGI TUGAS DAN MEMBERI PETUNJUK KEPADA STAF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS – TUGAS BADAN KESATUA BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI KOTA GUNUNGSITOLI.**
13. **MELAPORKAN SELURUH HASIL CAPAIAN BAIK RUTIN, BERKALA MAUPUN INSIDENTIAL KEPADA WALIKOTA MELALUI SEKRETARIS DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.**
14. **MENYAMPAIKAN SARAN PENDAPAT DAN TELAAHAN KEPADA WALIKOTA MELALUI SEKRETARIS DAERAH DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA.**
15. **MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI MELALUI SEKRETARIS DAERAH.**

II. RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT :

1. **MENGKOORDINIR HUBUNGAN KERJA ANTAR SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN, SUB.BAGIAN KEUANGAN, SUB.BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU;**
2. **MENGENDALIKAN DAN MENELITI TUGAS – TUGAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN SURAT / NASKAH DINAS LAINNYA;**
3. **MENELITI NASKAH DINAS YANG TELAH DISIAPKAN SETIAP BIDANG SEBELUM DI TANDATANGANI KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI KOTA GUNUNGSITOLI;**
4. **MENJABARKAN PETUNJUK KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI DAN KEPADA MASING – MASING BIDANG DAN SUB. BAGIAN MENURUT FUNGSI YANG DITENTUKAN;**
5. **MENGEVALUASI TUGAS STAF YANG TELAH DILAKSANAAN OLEH SETIAP SUB. BAGIAN;**
6. **MEMBERIKAN PENILAIAN MENGENAI KEMAMPUAN DAN KECAKAPAN PEGAWAI SETIAP AKHIR TAHUN;**
7. **MENFASILITASI KELANCARAN TUGAS SELURUH BIDANG DI LINGKUP KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI KOTA GUNUNGSITOLI;**
8. **MENGKOORDINIR USUL PENGAJUAN PROGRAM KERJA DAN BIAYA DARI MASING – MASING BIDANG.YANG ADA;**

9. MELAPORKAN HASIL KERJA SAMA DENGAN CARA MEMAJUKAN TELAAHAN STAF BAIK TERTULIS MAUPUN LISAN KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI KOTA GUNUNGSITOLI
10. MENGAJUKAN TELAAHAN STAF KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI MENGENAI KELANCARAN TUGAS KEDINASAN.
11. MENYAMPAIKAN SARAN DAN PENDAPAT KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI ;
12. MELAKUKAN KONSULTASI TERMASUK RAPAT / PERTEMUAN ANTAR INSTANSI SESUAI DENGAN PETUNJUK PIMPINAN.
13. MENYELENGGARAKAN TUGAS – TUGAS PENYIAPAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI KOTA GUNUNGSITOLI.
14. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH ATASAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI.

III. RINCIAN TUGAS KEPALA BIDANG IDEOLOGI NEGARA DAN KETAHANAN KEBANGSAAN :

1. MEMBANTU KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK DAN KEWASPADAAN DINI MELALUI SEKRETARIAT BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DI BIDANG KESATUAN BANGSA.
2. MENYUSUN KEBIJAKAN TEKNIS DAERAH DALAM RANGKA PEMBINAAN KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN PEMBAURAN BANGSA, PEMBINAAN MASYARAKAT TERHADAP IDEOLOGI BANGSA, PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH / NASIONAL.
3. MENYUSUN RENCANA KEGIATAN BERKAITAN DENGAN TUGAS – TUGAS PEMBINAAN KESATUAN DAN IDEOLOGI BANGSA.
4. MELAKUKAN ANALISA, MENYUSUN PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN, KEGIATAN PEMBINAAN KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN PEMBAURAN BANGSA, PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN IDEOLOGI BANGSA DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN, PEMBAURAN ANTAR SESAMA WARGA DAN BELA NEGARA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK – ASPEK MASYARAKAT DAN KARAKTERISTIK WILAYAH.
5. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN PEMBAURAN BANGSA, PEMBINAAN IDEOLOGI DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
6. MENYUSUN LAPORAN SECARA BERKALA KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBINAAN POLITIK BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PEMBAURAN BANGSA, PENGAMALAN IDEOLOGI DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN.
7. BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENELITIAN DAN KEBENARAN HASIL KERJA SAMA PARA KASUBBID PADA KESATUAN BANGSA.

- 8. MENGHIMPUN INFORMASI MENGLARIFIKASIKAN DAN MENGANALISA FENOMEA – FENOMENA / ISU YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN MASALAH – MASALAH SOSIAL LAINNYA.**
- 9. MENGARAHKAN DAN MEMBERI PETUNJUK KEPADA PARA KASUBBID BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA.**
- 10. MENYAMPAIKAN SARAN, PEDOMAN DAN TELAHAH KEPADA PIMPINAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI.**
- 11. MELAKUKAN TUGAS – TUGAS LAINNYA YANG DIBERIKAN PIMPINAN.**
- 12. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DI BERIKAN OLEH ATASAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.**

IV. RINCIAN TUGAS KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI :

- 1. MENYUSUN KEBIJAKAN TEKNIS DAERAH DALAM PEMBINAAN POLITIK DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILU**
- 2. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN PARPOL DAN FASILITASI PEMILU DI DAERAH**
- 3. MEMONITORING, MENGHIMPUN, MENGLASIFIKASI DAN MENGANALISA INFORMASI AKTUAL, ISU-ISU POLITIK YANG BERKEMBANG DITENGAH MASYARAKAT**
- 4. MENYIAPKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI DIBIDANG PEMILU, ORGANISASI POLITIK.**
- 5. MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS ETIKA POLITIK DAN BUDAYA POLITIK PANCASILA.**
- 6. MENYAMPAIKAN SARAN, PEDOMAN DAN TELAHAH KEPADA PIMPINAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 7. MELAKUKAN TUGAS-TUGAS LAINNYA YANG DIBERIKAN PIMPINAN.**
MENSOSIALISASIKAN UNDANG – UNDANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILU DAN PILKADA KOTA GUNUNGSITOLI.

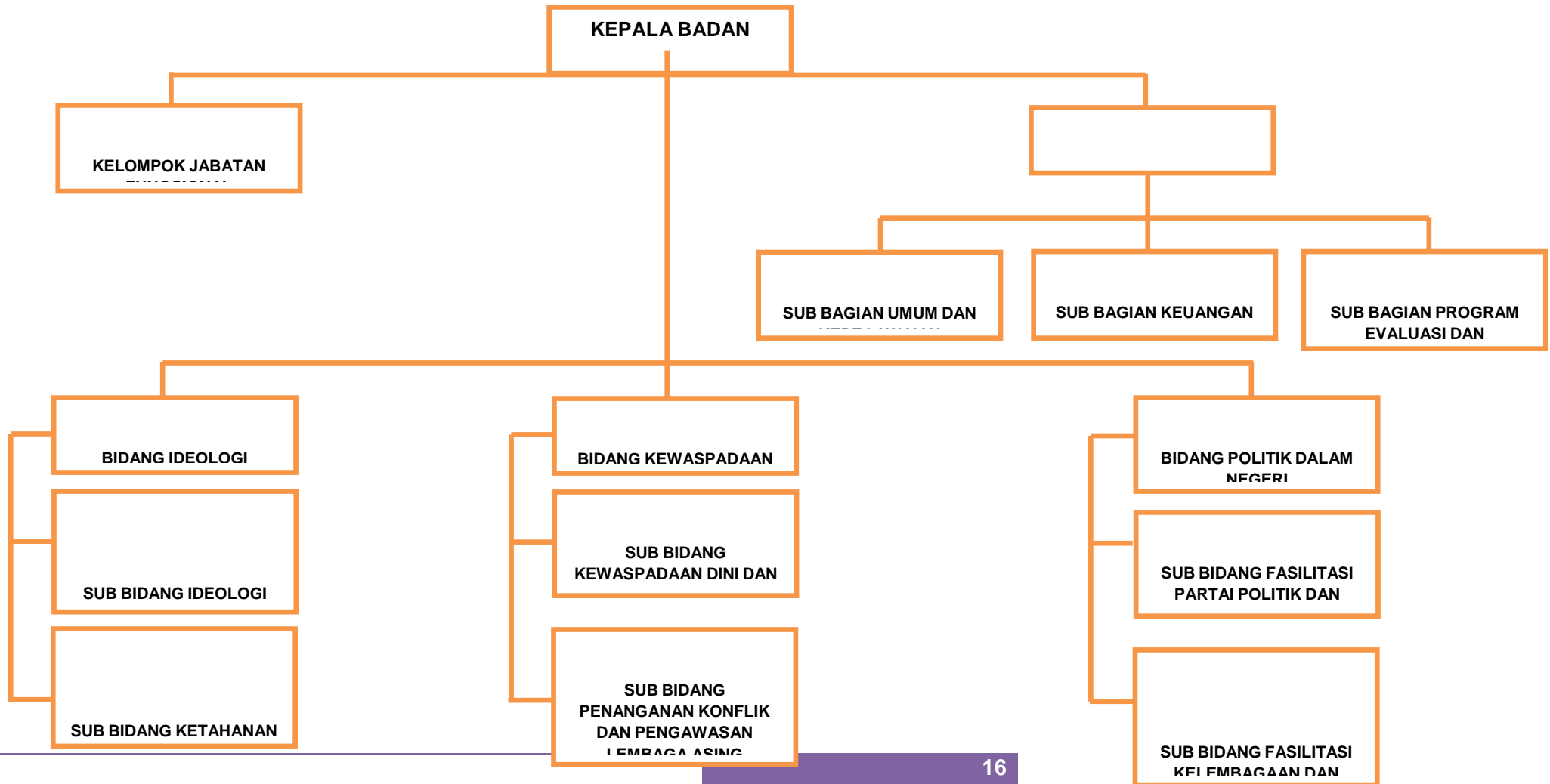
V. RINCIAN TUGAS KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DINI DAERAH :

- 1. MENYIAPKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI DIBIDANG PENANGANAN KONFLIK**
- 2. MENGUMPULKAN DATA DAN MENGOLAH DATA DAN MEMBUAT RENCANA PROGRAM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT, PENANGANAN KONFLIK DAN PENGAWASAN LEMBAGA /ORANG ASING;**
- 3. MENYUSUN RENCANA KEGIATAN BERKAITAN DENGAN TUGAS PEMBINAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

4. MENGHIMPUN INFORMASI MENGLARIFIKASIKAN DAN MENGANALISA FENOMENA/ISU YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN KEWASPADAAN MASYARAKAT;
5. MENGARAHKAN DAN MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA KASUBBID BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA
6. MENYAMPAIKAN SARAN,PEDOMAN DAN TELAAHAN KEPADA PIMPINAN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
7. MELAKUKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN ATASAN.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli

A. Sumber Daya Manusia

SECARA KESELURUHAN, KOMPOSISI JABATAN MENURUT ESELON DALAM STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL KOTA GUNUNGSITOLI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. ESELON II : 1 JABATAN
2. ESELON III : 4 JABATAN
3. ESELON IV : 9 JABATAN

SEDANGKAN KOMPOSISI PERSONIL BADAN KESBANGPOL KOTA GUNUNGSITOLI PADA SAAT INI BERJUMLAH 26 ORANG TERDIRI DARI 22 ORANG PNS, (2 ORANG PERBANTUAN DI BNN KOTA GUNUNGSITOLI) DAN 4 ORANG PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT). ADAPUN KOMPOSISI PEGAWAI BADAN KESBANG POL BERDASARKAN GOLONGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

TABEL : JUMLAH PEGAWAI BADAN KESBANGPOL BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

GOLONGAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	DIII	DII	SMA	
IV	2	3	-	-	-	5
III	1	9	2	-	5	17
II	-	-	-	-	-	-
HONOR/PTT	-	-	1	-	3	4

KETERANGAN : KONDISI SAMPAI 28 FEBRUARI 2017

DARI TABEL DI ATAS DAPAT DILIHAT DATA KEPEGAWAIAN BADAN KESBANGPOL PADA TAHUN 2017, DENGAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TINGKAT S1 PALING BANYAK YAITU 12 ORANG, URUTAN KEDUA TAMATAN SMA SEBANYAK 5 ORANG, URUTAN KETIGA TAMATAN S2 SEBANYAK 3 ORANG, DIII SEBANYAK 2 ORANG.

B. Sarana dan Prasarana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli sampai keadaan ini belum memiliki gedung kantor sendiri (sewa). Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Badan Kesbangpol Kota Gunungsitoli, Badan Kesbangpol memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

TABEL : SARAN DAN PRASARANA BADAN KESBANGPOL

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah
	KENDARAAN			ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
1.	Mobil Pemadam Kebakaran	1	11.	P.C. Unit	2
2.	Sepeda Motor	1	12.	Laptop	3
3.	Scutter	1	13.	Note Book	3
	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		14.	Printer	3
1.	Filling Besi / Metal	7	15.	Hard Disk	1
2.	Papan Pengumuman	2			
3.	Lemari Kayu	2			
4.	Kursi Tamu	1			
5.	Kursi Putar	11			
6.	Kursi Biasa	15			
7.	Meja ½ Biro	20			
8.	Kipas angin	2			
9.	Tustel (Camera Digital)	1			
10.	Handy Cam	1			

KETERANGAN : KONDISI SAMPAI 01 OKTOBER 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli

Program dan kegiatan pada SKPD adalah program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol setiap tahunnya yang pada dasarnya terkait dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya Badan Kesbang Pol yang diharapkan secara

langsung ataupun tidak langsung dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang optimal, baik terhadap internal aparatur pemerintah maupun terhadap publik. Program dan kegiatan pada SKPD yang dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA GUNUNGSITOLI

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI SKPD	TARGER SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- II					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - II					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE - II				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	TERWUJUDNYA PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DI 6 KECAMATAN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	93%	97%	100%	100%	95%	93%	97%
2.	TERLAKSANANYA PENDIDIKAN POLITIK KEPADA SEMUA PARPOL, ORMAS, OKP DAN LSM DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	93%	100%	100%	100%	89%	93%
3.	TERWUJUDNYA KEMITRAAN KEPADA FKUB, FKDM, FPK DAN KOMINDA				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	96%	100%	-	-	100%	96%	100%
4.	TERLAKSANANYA UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT DHI. NARKOBA/MIRAS, PROSTITUSI, UANG PALSU, PREMANISME, PERJUDIAN, PENYELUNDUPAN DAN EKSPLOITASI ANAK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%
5.	TERLAKSANANYA UPAYA PENCEGAHAN DINI BENCANA ALAM DI KOTA GUNUNGSITOLI				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	87%	99%	-	100%	100%	87%	99%
6.	TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN DI				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	94%	99%	-	100%	100%	94%	99%

KOTA GUNUNGSITOLI																			
7.	TERWUJUDNYA KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DI 101 DESA/KEL. DI KOTA GUNUNGSITOLI				100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	75%	96%	100%	99%	100%	75%	96%
8.	TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI 6 KEC. KOTA GUNUNGSITOLI				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	68%	100%	100%	100%	87%	68%	100%

Gunungsitoli, 2016
 Kepala Badan Kesbang dan Politik
 Kota Gunungsitoli,

Drs. SINEMA GULO
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19621230 198603 1 005

TABEL 2.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA GUNUNGSITOLI

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN TAHUN KE- II					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - II					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN KE - II					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	170.300.000	213.400.000	260.060.000	277.000.000	291.850.000	169.689.200	208.479.200	248.790.550	258.151.280	285.775.753	99%	97%	95%	93%	97%	71%	68%
Program																	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	53.300.000	8.400.000	38.830.000	29.260.000	91.400.000	45.540.000	7.323.500	38.830.000	29.260.000	89.557.050	85%	87%	100%	100%	97%	71%	96%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	13.250.000	43.948.600	44.728.100	41.898.200	42.062.200	66%	58%	89%	83%	84%	1%	2%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	140.000.000	340.000.000	235.000.000	306.000.000	276.000.000	140.000.000	339.400.000	229.675.000	292.431.450	267.328.625	100%	99%	97%	95%	96%	97%	90%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	51.250.000	73.960.000	117.770.000	173.000.000	173.000.000	46.072.600	73.560.000	116.670.000	164.807.790	170.821.725	89%	99%	99%	95%	98%	2%	2%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	215.000.000	160.000.000	265.000.000	-	-	202.468.000	120.141.000	256.452.650	0%	0%	94%	75%	96%	23%	26%
Program Pemberdayaan	-	-	-	85.000.000	5.000.000	-	-	-	58.516.275	5.000.000	0%	0%	0%	68%	100%	(-)1%	(-)91%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan																		
Program Pemantapan Peningkatan Ideologi	11.000.000	20.000.000	-	-	-	10.000.000	13.662.000	-	-	-	90%	68%	0%	0%	0%	81%	36%	
Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	

Gunungsitoli, 2016
Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kota Gunungsitoli,

Drs. SINEMA GULO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621230 198603 1 005

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Makan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Monitoring/survey/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10. Penyediaan jasa administrasi Umum
11. Penyediaan jasa kebersihan kantor
12. Penyediaan jasa Administrasi Kantor
13. Penyediaan jasa Supir/Kkernet/operator alat berat
14. Penyediaan jasa keamanan kantor

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4. Sewa gedung kantor

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4. Sewa gedung kantor

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Badan Kesbang Pol tahun 2011-2016, pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD ini dapat berjalan dengan baik dengan kisaran capaian kinerja 85%-100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada SKPD, Badan Kesbang Pol

tidak mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sedangkan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Badan KesbangPol adalah Urusan Wajib pada Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 1. Peringatan hari – hari besar Nasional,
 2. Verifikasi Berkas Administrasi/Verifikasi Lapangan Orkemas,
 3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitas Penguatan kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM,
 2. Fasilitas Penguatan kelembagaan Forum Pemantauan orang asing
 3. Fasilitas FORKOPIMDA.
- c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan sosialisasi pencegahan bencana alam.
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 1. Pendidikan politik bagi perempuan dan pelajar,
 2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Parpol,
 3. Pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan kegiatan fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
- f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan kegiatan penyuluhan bahaya Narkoba, Miras dan bahaya Prostitusi bagi masyarakat dan pelajar.

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan kegiatan pokok Badan Kesbang Pol karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat vital bagi kesuksesan rangkaian proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa setiap tahunnya.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesbang Pol periode 2011-2016, secara umum dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan

dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja yang berada pada kisaran 85% - 100% untuk relisasi fisik dan 80% - 100% untuk realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.

Berdasarkan sumber daya yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tupoksi yang diemban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, ormas, LSM dan partai politik. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pemberian rekomendasi izin penelitian, pendaftaran ormas, verifikasi bantuan kepada partai politik dan lain sebagainya.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tugas di atas, kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi Politik Masyarakat

Secara umum partisipasi politik masyarakat di Kota Gunungsitoli cukup baik, namun jika dilihat perkembangan pemilih yang memberikan suara pada Pemilu 2009 (Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II) dan Pemilu Kada Gubernur 2010 terdapat kecenderungan penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya pelaksanaan pemilihan yang bertepatan dengan hari libur serta pengaruh perkembangan situasi politik dalam negeri.

b. Peranan Infrastruktur politik

Partai politik sebagai infrastruktur politik belum dapat memberikan peranan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh terjadinya beberapa perubahan partai politik ditingkat nasional dan lokal. Saat ini terdapat partai politik yang terdaftar di Kota Gunungsitoli.

c. Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa

Pengaruh globalisasi dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di kalangan generasi muda. Secara bertahap telah dilaksanakan kegiatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Namun demikian perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi melemahnya wawasan kebangsaan dan semangat persatuan kesatuan serta semangat Bela Negara.

d. Koordinasi Kelembagaan Pemerintah di Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di daerah tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga melibatkan instansi vertikal serta lembaga legislatif di daerah. Selama ini telah diupayakan menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang harmonis antara lembaga pemerintah di daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Dari uraian diatas, diharapkan lima tahun kedepan kondisi yang ada saat ini dapat ditingkatkan menjadi kondisi yang lebih baik seperti sebagai berikut :

- a. Partisipasi Politik Masyarakat Diharapkan dalam lima tahun ke depan dapat ditingkatkan partisipasi politik masyarakat. Peningkatan partisipasi politik dapat dilihat antara lain pada pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur tahun 2018 dan Pemilu 2019 (Legislasi dan Pilpres). Disamping itu juga dapat dilihat partisipasinya dalam merespons kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Peranan infrastruktur politik Diharapkan dalam lima tahun ke depan partai politik yang ada sekarang dapat tumbuh dan berkembang secara baik serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara.
- c. Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Eksistensi dan keutuhan bangsa Indonesia di masa depan sangat tergantung kepada wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa yang dimiliki oleh generasi muda saat ini. Oleh sebab itu diharapkan generasi muda dapat dimantapkan wawasan kebangsaannya sehingga semangat Bela Negara dan rasa persatuan kesatuan bangsa dapat ditingkatkan. Hingga akhirnya eksistensi dan keutuhan bangsa dan negara dapat dipertahankan.
- d. Koordinasi Kelembagaan Pemerintahan di Daerah. Hubungan Kerjasama dan koordinasi antar lembaga pemerintahan di Daerah akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, disamping itu juga dapat meneruskan kebijakan dan program Nasional serta Program Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat ditingkatkan sinergi hubungan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan di daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM RENSTRA BADAN KESBANG POL ADALAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KESBANG POL UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESBANG POL YANG SELARAS DENGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAERAH SERTA RENCANA PROGRAM PRIORITAS DALAM RANCANGAN AWAL RPJMD. STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BADAN KESBANG POL MENUNJUKKAN BAGAIMANA CARA BADAN KESBANG POL MENCAPAI TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH, DAN TARGET KINERJA HASIL (OUTCOME) PROGRAM PRIORITAS RPJMD YANG MENJADI TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESBANG POL. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM RENSTRA INI SELANJUTNYA MENJADI DASAR PERUMUSAN KEGIATAN BAGI SETIAP PROGRAM PRIORITAS RPJMD YANG MENJADI TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESBANG POL.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MERUPAKAN RUMUSAN PERENCANAAN KOMPREHENSIF TENTANG BAGAIMANA BADAN KESBANG POL DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN. DENGAN PENDEKATAN YANG KOMPREHENSIF, STRATEGI JUGA DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK MELAKUKAN TRANSFORMASI, REFORMASI DAN PERBAIKAN KINERJA BIROKRASI. PERENCANAAN STRATEGIK TIDAK SAJA MENGAGENDAKAN AKTIVITAS PEMBANGUNAN, TETAPI JUGA SEGALA PROGRAM YANG Mendukung dan Menciptakan Layanan Masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

RUMUSAN STRATEGI MERUPAKAN PERNYATAAN-PERNYATAAN YANG MENJELASKAN BAGAIMANA TUJUAN DAN SASARAN AKAN DICAPAI SERTA SELANJUTNYA DIJABARKAN DALAM SERANGKAIAN KEBIJAKAN. RUMUSAN STRATEGI JUGA HARUS MENUNJUKKAN KEINGINAN YANG KUAT BAGAIMANA BAPPEDA MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH (VALUE ADDED) BAGI STAKEHOLDER LAYANAN. DISINI PENTING UNTUK MENDAPATKAN PARAMETER UTAMA YANG MENUNJUKKAN BAGAIMANA STRATEGI TERSEBUT MENCIPTAKAN NILAI (STRATEGIC OBJECTIVE). MELALUI PARAMETER TERSEBUT DAPAT DIKENALI INDIKASI KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN SUATU STRATEGI SEKALIGUS UNTUK MENCIPTAKAN BUDAYA BERFIKIR STRATEGIK DALAM MENJAMIN BAHWA TRANSFORMASI MENUJU PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH YANG LEBIH BAIK, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERKOMITMEN TERHADAP KINERJA, STRATEGI HARUS DIKENDALIKAN DAN DIEVALUASI (LEARNING PROCESS).

ANALISIS PILIHAN STRATEGI SWOT

ANALISIS SWOT ADALAH METODE PERENCANAAN STRATEGIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGEVALUASI KEKUATAN (STRENGTHS), KELEMAHAN (WEAKNESSES), PELUANG (OPPORTUNITIES), DAN ANCAMAN (THREATS) DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA KEDEPAN. KEEMPAT FAKTOR ITULAH YANG MEMBENTUK AKRONIM SWOT (STRENGTHS , WEAKNESSES , OPPORTUNITIES , DAN THREATS). PROSES INI MELIBATKAN PENENTUAN TUJUAN YANG SPESIFIK DAN MENGIDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG Mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. ANALISIS SWOT DAPAT DITERAPKAN DENGAN CARA MENGANALISIS DAN MEMILAH BERBAGAI HAL YANG MEMPENGARUHI KEEMPAT FAKTORNYA, KEMUDIAN MENERAPKANNYA DALAM MATRIK SWOT, DIMANA APLIKASINYA ADALAH BAGAIMANA KEKUATAN MAMPU MENGAMBIL KEUNTUNGAN (ADVANTAGE) DAN MENGATASI KELEMAHAN DARI PELUANG YANG ADA, SELANJUTNYA BAGAIMANA KEKUATAN MAMPU MENGHADAPI ANCAMAN DAN BAGIMANA CARA MENGATASI KELEMAHAN YANG ADA.

ANALISIS SWOT DILENGKAPI DENGAN INFORMASI YANG RELEVAN MELALUI PROSES ANALISIS YANG SEKSAMA UNTUK KEGIATAN PENILAIAN SITUASI KONDISI SUATU ORGANISASI, DAPAT

TERCAKUP DALAM ANALISIS **SWOT** YANG TERDIRI ATAS DUA KEGIATAN UTAMA YAITU ANALISIS INTERNAL DAN ANALISIS EKSTERNAL TERHADAP KEBERADAAN SUATU ORGANISASI. PROSES ANALISISNYA SENDIRI BISA DIMULAI DARI INTERNAL DAN EKSTERNAL DULU ATAU KEDUA-DUANYA SECARA BERSAMA-SAMA.

KEKUATAN, DAPAT DIWUJUDKAN SEBAGAI SUATU SUMBER DAYA, KETERAMPILAN/ KEMAMPUAN, ATAU KEUNTUNGAN. **SEDANGKAN KELEMAHAN** DAPAT DIDEFINISIKAN SEBAGAI SUATU HAL BATASAN ATAU KEKURANGAN DALAM SUMBER DAYA, KETERAMPILAN/KEMAMPUAN DAN KAPABILITAS YANG SECARA SERIUS MERINTANGI PERFORMANSI EFEKTIF SUATU ORGANISASI. FASILITAS, SUMBERDAYA FINANCIAL, KAPABILITAS MANAJEMEN, KETERAMPILAN, DAPAT MENJADI SUMBER DARI KELEMAHAN-KELEMAHAN ORGANISASI.

PELUANG, MERUPAKAN SUATU KONDISI MENGUNTUNGKAN UTAMA DALAM LINGKUNGAN ORGANISASI TERTENTU. **SEDANGKAN ACAMAN** DAPAT BERWUJUD SEBAGAI SUATU SITUASI TIDAK MENGUNTUNGKAN DARI LINGKUNGAN ORGANISASI TERTENTU, DAPAT JUGA DIARTIKAN SEBAGAI RINTANGAN-RINTANGAN KUNCI TERHADAP POSISI ORGANISASI SAAT INI DAN YANG DIINGINKAN.

SWOT ANALISA INTERNAL DAN EKSTERNAL

KEKUATAN (STRENGTHS)		KELEMAHAN (WEAKNESSES)	
S1	PERAN UTAMA LEMBAGA YANG SANGAT STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	W1	TENAGA PLANNER DAN TENAGA SKILL YANG MASIH KURANG
S2	MOTIVASI, SPIRIT DAN ETOS KERJA APARATUR YANG CUKUP TINGGI	W2	FASILITAS PENDUKUNG KERJA KURANG MEMADAI
S3	JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR SECARA KUANTITAS MENCUKUPI	W3	BELUM SEBANDINGNYA ANTARA VOLUME PEKERJAAN
S4	JUMLAH ANGGARAN CUKUP MEMADAI	W4	KESENJANGAN KUANTITAS DAN KOMPETENSI PERSONIL ANTAR UNIT KERJA INTERNAL BANYAKNYA DANA YANG TERALOKASI UNTUK PENINGKATAN SUMBER DAYA MASYARAKAT
PELUANG (OPPORTUNITIES)		TANTANGAN (THREATS)	
O1	DUKUNGAN PENUH DARI JAJARAN PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH DALAM	T1	TUNTUTAN TERHADAP KUALITAS KINERJA YANG HARUS DITINGKATKAN DAN DAPAT

	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI		DIPERTANGGUNGJAWABKAN (T1)
O2	JARINGAN KERJA LEMBAGA TERBUKA PADA LEVEL REGIONAL DAN NASIONAL	T2	BELUM DIDUKUNG SITEM REGULASI DITINGKAT DAERAH
O3		T3	
O4	ADANYA KESEMPATAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	T4	BERTAMBAHNYA RUANG LINGKUP TUGAS YANG DITANGANI SEBAGAI IMPLIKASI DARI PERATURAN PERUNDANGAN TERBARU

MATRIKS SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>PELUANG (OPPORTUNITIES) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DUKUNGAN PENUH DARI JAJARAN PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 2. JARINGAN KERJA LEMBAGA TERBUKA PADA LEVEL REGIONAL DAN NASIONAL 3. ADANYA KESEMPATAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SDM APARATUR 	<p>TANTANGAN (THREATS) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TUNTUTAN TERHADAP KUALITAS KINERJA YANG HARUS DITINGKATKAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2. BELUM DIDUKUNG SITEM REGULASI DITINGKAT DAERAH 3. BERTAMBAHNYA RUANG LINGKUP TUGAS YANG DITANGANI SEBAGAI IMPLIKASI DARI PERATURAN PERUNDANGAN TERBARU
	<p>KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <p>1 PERAN UTAMA LEMBAGA</p>	<p>STARTEGI KEKUATAN - PELUANG (S-O) :</p>

<p>YANG SANGAT STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA</p> <p>2. MOTIVASI, SPIRIT DAN ETOS KERJA APARATUR YANG CUKUP TINGG</p> <p>3. JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR SECARA KUANTITAS MEMCUKUPI</p> <p>4. FASILITAS PENDUKUNG KERJA CUKUP MEMADAI</p>	<p>1 MENINGKATKAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA</p> <p>2 MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN STABILITAS DAERAH</p> <p>3 MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KESBANG POL</p> <p>4. MENINGKATKAN KUALITAS SDM UNTUK Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Kinerja.</p>	<p>1 MENINGKATKAN INTENSITAS DAN KUALITAS KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN REGIONAL</p> <p>2 MENGEMBANGKAN SISTEM REGULASI YANG BERSIFAT OPERASIONAL UNTUK Mendukung Pelaksanaan Kinerja.</p> <p>3. MENINGKATKAN HUBUNGAN KERJA INTERNAL YANG DIDUKUNG OLEH MOTIVASI DAN ETOS KERJA YANG TINGGI.</p>
<p>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</p> <p>1 TENAGA PLANNER DAN TENAGA SKILL YANG MASIH KURANG</p> <p>2. FASILITAS PENDUKUNG KURANG MEMADAI</p> <p>3. KESENJANGAN KUANTITAS DAN KOMPETENSI PERSONIL ANTAR UNIT KERJA INTERNAL</p> <p>4. BANYAKNYA DANA YANG TERALOKASI UNTUK PENINGKATAN SUMBER DAYA MASYARAKAT STRATEGI</p>	<p>STARTEGI KELEMAHAN - PELUANG (W-O) :</p> <p>1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM DAN TENAGA SKILL SECARA LEBIH PROFESIONAL.</p> <p>2. MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DAN PENGELO-LAANNYA DALAM RANGKA Mendukung Peningkatan Kinerja Lembaga dan Pegawai.</p> <p>3. MENGELOLA ANGGARAN SECARA LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL.</p> <p>4. MENATA PERSONIL PEGAWAI SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA INTERNAL.</p> <p>5. MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN KINERJA AGAR OPTIMALNYA Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.</p>	<p>STARTEGI KELEMAHAN/TANTANGAN (W-T) :</p> <p>1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kinerja yang ditandai dengan peningkatan keamanan dan stabilitas daerah</p> <p>2. Membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup sektoral dan regional</p>

1. STARTEGI KEKUATAN – PELUANG (S – O) :

- A. **MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**
- B. **MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS SISTEM LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.**

C. **MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SERTA PELAPORAN.**

D. **MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI YANG DAPAT Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Kinerja.**

2. STRATEGI KELEMAHAN – PELUANG (W – O) :

A. **MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM PERENCANA DAN TENAGA SKILL SECARA LEBIH PROFESIONAL.**

B. **MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DAN PENGELOLAANNYA DALAM RANGKA Mendukung Peningkatan Kinerja Lembaga dan Pegawai.**

C. **MENGELOLA ANGGARAN SECARA LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL.**

D. **MENATA PERSONIL PEGAWAI SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK UNIT KERJA INTERNAL.**

E. **MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN KINERJA AGAR OPTIMALNYA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

3. STRATEGI KEKUATAN – TANTANGAN (S – T) :

A. **MENINGKATKAN INTENSITAS DAN KUALITAS KOORDINASI LINTAS SKPD (LINTAS SEKTOR) DAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN.**

B. **MENGEMBANGKAN SISTEM REGULASI YANG BERSIFAT OPERASIONAL UNTUK Mendukung Pelaksanaan Kinerja.**

C. **MENINGKATKAN HUBUNGAN KERJA INTERNAL YANG DIDUKUNG OLEH MOTIVASI DAN ETOS KERJA YANG TINGGI.**

4. STRATEGI KELEMAHAN – TANTANGAN (W – T) :

A. **MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KINERJA YANG DITANDAI DENGAN LEBIH BESARNYA VOLUME PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH.**

B. **MEMBANGUN JARINGAN KERJA YANG LEBIH BAIK DAN LUAS PADA RUANG LINGKUP INTERNAL DAN EKSTERNAL (NETWORKING).**

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MELAKSANAKAN PELAYANAN PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI PADA SETIAP BIDANG SESUAI DENGAN TUPOKSI TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. PERMASALAHAN PADA BIDANG IDEOLOGI DAN KETAHANAN BANGSA :

1. MAKIN HARI RASA BERBANGSA DAN BERNEGARA MAKIN “MEMUDAR”,
2. MAKIN MENURUNNYA MORAL DARI GENERASI MUDA KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT UMUMNYA,
3. SIKAP DAN TINDAK TANDUK MASYARAKAT SUDAH JAUH DARI NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA,
4. DENGAN ADANYA OTONOMI DAERAH APALAGI OTONOMI PENDIDIKAN MELEMAHKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA,
5. KURANGNYA DUKUNGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MORAL BANGSA,
6. KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT MENDAFTARKAN ORMAS DAN LSM,
7. BELUM TERHIMPUN SELURUH DATA ORMAS DAN PARPOL, LSM DI KOTA GUNUNGSITOLI,
8. BELUM MAKSIMAL PELAKSANAAN MONEV TERHADAP KEBERADAAN ORMAS, PARPOL DAN LSM DI KOTA GUNUNGSITOLI.

B. PERMASALAHAN PADA BIDANG KEWASPADAAN DINI DAERAH :

1. KARAKTERISTIK DAERAH YANG DIBANGUN DALAM KONDISI YANG MASIH TERBATAS YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERAWANAN SOSIAL, POLITIK DAN KEWILAYAHAN SERTA RAWAN AKAN KONFLIK,
2. MASIH LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR LEMBAGA SEKTORAL DI BIDANG KEWASPADAAN DINI.

C. PERMASALAHAN PADA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI :

1. MASIH TERBATASNYA PENDIDIKAN POLITIK PADA MASYARAKAT DAN GENERASI MUDA,

2. BELUM TERLAKSANANYA SOSIALISASI UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN DPR, DPRD PROPINSI, DPRD. DAN SESUAI PASAL 150 PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMFASILITASI PEMILU,
3. KURANGNYA KESADARAN PENGURUS PARPOL PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN ADMINISTRASI,

D. MASALAH YANG BERSIFAT INTERNAL

- A. BELUM TERPENUHINYA KEBUTUHAN IDEAL SUMBER DAYA MANUSIA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI BAIK SECARA KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.
- B. MASIH BELUM TERPENUHINYA SECARA IDEAL SARANA DAN PRASARANA DALAM MENUNJANG AKTIVITAS PEKERJAAN. HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUGAS.
- C. BELUM MAKSIMALNYA TUGAS-TUGAS INTERNAL. HAL INI DIPENGARUHI OLEH STANDAR DAN PEDOMAN KERJA YANG RELATIF MASIH TERBATAS, ADANYA TUMPANG TINDIH TUPOKSI DAN PROGRAM / KEGIATAN DENGAN SKPD LAINNYA.

3.2. *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih*

Dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 Visi Kota Gunungsitoli dalam jangka menengah tersebut adalah “**Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing**”.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan melayani.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.

Terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik, sangat diperlukan perencanaan yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan langkah awal dalam tahapan

penguatan ketahanan bangsa dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut :

1. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan.
2. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
3. Mengkaji ulang secara menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu dan merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini.
4. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah.
5. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.
7. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah.
8. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya dengan memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.
9. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa yang juga memfasilitasi pembangunan Sistem Politik yang Demokratis, maka Badan Kesbangpol Kota Gunungsitoli dewasa ini diharapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut di atas, juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan Tupoksi Badan Kesbangpol.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi, namun demikian, terdapat juga sejumlah momentum strategis yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol dimana terdapat sejumlah faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Berdasarkan kondisi di atas, berikut ini diuraikan beberapa isu yang menjadi faktor dalam pelaksanaan tugas yaitu :

1. Faktor pendorong :

a. Kondisi Politik

- Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik,
- Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat,
- Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah,
- Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat,
- Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

b. Kondisi Sosial Budaya

- Terbentuknya kesempatan pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional
- Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai perekat NKRI
- Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing,
- Meningkatnya Kesadaran dan Kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan Ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,
- Makin meningkatnya pengembangan Wawasan Kebangsaan ditengah kehidupan bermasyarakat.

c. Kondisi Ekonomi

- Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah,
- Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah,
- Terbentuknya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi,
- Kondisi geografis Kota Gunungsitoli yang berbatasan dengan Kabupaten lain yang kaya dengan sumber daya alam,

- Penduduk Kota Gunungsitoli yang jumlahnya cukup dan berpotensi sebagai tenaga kerja.

d. Kondisi keamanan / Ketentraman

- Terkoordinirnya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat,
- Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu setiap adanya konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat,
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan,
- Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Faktor penghambat :

a. Kondisi Politik

- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam demokrasi
- Belum optimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi
- Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Masih eksisnya perilaku politik masyarakat yang tidak responsive terhadap agenda reformasi
- Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi

b. Kondisi Sosial

- Belum mantapnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat
- Belum mantapnya kesadaran akan pluralism dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi
- Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba

c. Kondisi Ekonomi

- Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah
- Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
- Masih signifikannya kesenjangan pendapat antara masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
- Belum terkelolanya aset daerah dengan baik
- Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih belum teratasi

d. Kondisi Keamanan dan Ketentraman

- Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan
- Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat bernegara
- Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Gunungsitoli Memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah kepulauan Nias. Keberadaan infrastruktur strategis seperti Bandar Udara, pelabuhan laut, jaringan jalan, sarana prasarana perekonomian, sarana prasarana pendidikan, dsb merupakan salah satu nilai tambah daya saing Kota Gunungsitoli sebagai kutub pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka karakteristik potensi unggulan Kota Gunungsitoli meliputi Industri, perdagangan dan jasa, pertanian, dan pariwisata. Sedangkan isu strategis Kota :

1. Belum optimalnya pengembangan industri daerah,
2. Masih rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil produk pertanian,
3. Belum optimalnya penataan dan penyediaan fasilitas pendukung kawasan destinasi pariwisata.

Berdasarkan potensi pengembangan wilayah kawasan strategis Kota Gunungsitoli yang diusulkan berdasarkan potensi dan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, antara lain :

1. Kawasan strategis ekonomi, meliputi :
 - a. Kawasan pertumbuhan perekonomian di wilayah Nazalou Lolowua, Teluk Belukar, Oloro, Tuhegeo I, Ilir, Pasar Gunungsitoli, Saombo.
 - b. Kawasan pengembangan industri di wilayah Teluk Belukar, Oloro,
 - c. Kawasan pariwisata bahari di Teluk Belukar, Afia, Pasar Gunungsitoli, Turendra, Fowa dan pendukung pariwisata berupa perhotelan dan sarana prasarana tempat hiburan di wilayah PPK, dan
 - d. Kawasan pengembangan pendidikan di wilayah Gunungsitoli dan Gunungsitoli Idanoi.
2. Kawasan strategis sosial budaya meliputi :
 - a. Kawasan budaya/rumah adat,
 - b. Kawasan situs batu megalith,
 - c. Kawasan tempat bersejarah.
3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi daerah Rawan Bencana Tsunami yang ditetapkan disepanjang pesisir pantai kota Gunungsitoli.
4. Kawasan strategis sumber daya alam ditetapkan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mencermati permasalahan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun terakhir, serta memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dewasa ini, yang diprediksi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kota gunungsitoli dalam mewujudkan visi pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang, maka telah diidentifikasi beberapa isu-isu strategis daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
3. Infrastruktur dan penataan kota.
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
5. Pemberdayaan dan penguatan desa.

Menyikapi lingkungan dan isu strategis tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan program/kegiatan prioritas antara lain :

Secara teoritis perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, begitu pula halnya dalam proses pembangunan. Oleh Karena itu perencanaan memegang peranan sentral dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam

pembangunan. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup pengambilan keputusan atau pilihan-pilihan dari berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari perencanaan pembangunan tersebut tidak lain adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, ruang waktu serta fungsi pemerintahan. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di samping itu juga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BERDASARKAN PENGAMATAN DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM DAN PROSES PERENCANAAN YANG DILAKUKAN SELAMA INI, BAIK PERENCANAAN PROGRAM MAUPUN PERENCANAAN ANGGARAN. PERENCANAAN YANG DIHASILKAN TERSEBUT BELUM MAMPU MEMUASKAH HARAPAN SELURUH MASYARAKAT. HAL INI TERJADI KARENA PERENCANAAN YANG DILAKUKAN MASIH BERSIFAT SENTRALISTIK, DIMANA SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN LEBIH DOMINAN DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH. PERENCANAAN YANG BERSIFAT SENTRALISTIK INI SERING DISEBUT SEBAGAI PERENCANAAN DARI ATAS ATAU TOP - DOWN PLANNING .

SEIRING DENGAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH SEPERTI SAAT INI, DIMANA DAERAH MEMPEROLEH KEWENANGAN YANG CUKUP BESAR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN, MAKA PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERGESER DARI PERENCANAAN DARI ATAS KE PERENCANAAN DARI BAWAH (BOTTOM - UP PLANNING). KEUNGGULAN DARI PERENCANAAN DARI BAWAH ADALAH BAHWA HASIL PERENCANAAN YANG DISUSUN LEBIH ASPIRATIF DIKARENAKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN LEBIH BESAR. DENGAN PENDEKATAN PERENCANAAN DARI BAWAH INI MASYARAKAT DITEMPATKAN SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT DIANGGAP LEBIH TAHU TENTANG PERMASALAHAN DAN KEBUTUHANNYA. KARENA ITU PERENCANAAN DARI BAWAH DIYAKINI MAMPU MENJAWAB PERSOALAN-PERSOALAN YANG TENGAH DIHADAPI MASYARAKAT.

DALAM RANGKA MENYIKAPI PERUBAHAN SISTEM PERENCANAAN DI ATAS PEMERINTAH MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. HAL-HAL POKOK YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN SEBAGAIMANA YANG

TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG INI DIPERTEGAS LAGI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. BERDASARKAN KEDUA UNDANG-UNDANG TERSEBUT DAERAH DIWAJIBKAN MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN. SEDANGKAN MEKANISME PENJARINGAN DAN PEMBAHASAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK SETIAP TINGKATAN PERENCANAAN DILAKUKAN MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG), YANG TERDIRI DARI MUSRENBANG RPJP, MUSRENBANG RPJM, MUSRENBANG RKPD, MUSRENBANG KECAMATAN DAN MUSRENBANG NAGARI.

BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN DI ATAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TELAH BERUPAYA MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU. TETAPI PERENCANAAN YANG DISUSUN TERSEBUT TENTUNYA TIDAK TERLEPAS DARI BERBAGAI KEKURANGAN DAN PERMASALAHAN. PERMASALAHAN UTAMA YANG MENGEMUKA ADALAH TIDAK MAMPUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DISUSUN MEMECAHKAN PERMASALAHAN DAN PERSOALAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH.

BEBERAPA FAKTOR YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA PERMASALAHAN DI ATAS ADALAH TIDAK TERIDENTIFIKASINYA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DENGAN BAIK, SEHINGGA KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DISUSUN TIDAK BAIK PULA. LEMAHNYA IDENTIFIKASI MASALAH INI DISEBABKAN OLEH BELUM PROFESIONALNYA ATAU RENDAHNYA KEMAMPUAN APARAT PERENCANA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN. DI SAMPING ITU KESALAHAN DALAM PERENCANAAN DISEBABKAN OLEH TIDAK TERSEDINYA DATA DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI. DATA YANG TERSEDIA SEBAGIANNYA TIDAK VALID DAN SEBAGIAN LAGI TIDAK AKURAT, SEHINGGA DATA TIDAK MAMPU MEMBERIKAN PENJELASAN DAN INFORMASI YANG MEMADAI MENGENAI KONDISI DAN PERMASALAHAN YANG TERJADI DI BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN.

PADA SISI LAIN MEKANISME PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT BELUM ASPIRATIF DAN PARTISIPATIF DAN JUGA TERLIHAT BAHWA PENDEKATAN PERENCANAAN DARI ATAS LEBIH DOMINAN DARI PADA PENDEKATAN PERENCANAAN DARI BAWAH. ARTINYA DERAJAT DAN KUALITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SELAMA INI BELUM OPTIMAL.

DI SAMPING ITU PENYEBAB LAIN YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA ADALAH BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, BAIK KOORDINASI INTERNAL ANTAR INSTANSI DI DAERAH DAN EKSTERNAL DENGAN DAERAH LAIN, PROPINSI DAN PUSAT. KONDISI INI MENGAKIBATKAN PERENCANAAN YANG DISUSUN TIDAK TERINTEGRASI DENGAN BAIK, SEHINGGA SINERGITAS DAN SINKRONISASI PERENCANAAN SEOLAH-OLAH TIDAK ADA. KETIADAAN SINERGITAS, SINKRONISASI DAN INTEGRASI INI MENIMBULKAN INKONSISTENSI PERENCANAAN SATU SAMA LAINNYA DAN DARI WAKTU KE WAKTU.

PERMASALAHAN DAN FAKTOR PENYEBAB INI SELANJUTNYA MENYEBABKAN BELUM MAMPUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIHASILKAN MEMBERI JAWABAN DAN SOLUSI YANG TEPAT TERHADAP PERMASALAHAN YANG MUNCUL DI TENGAH MASYARAKAT. KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG DISUSUN BELUM SEPENUHNYA DAPAT MENDORONG PENGEMBANGAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. KARENA KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERSEBUT TIDAK MATANG DAN TIDAK BERKELANJUTAN.

MERUJUK KEPADA GAMBARAN UMUM ATAU KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ATAS, PROYEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KE DEPAN DITUJUKAN UNTUK MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERARAH, KONSISTEN, TERPADU DAN BERKELANJUTAN. YAITU SUATU PERENCANAAN YANG DISUSUN SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DALAM RANGKA Mendapatkan PERENCANAAN YANG MAMPU MENYELESAIKAN PERMASAALAHAN DAN MEMENUHI ASPIRASI MASYARAKAT. DENGAN KATA LAIN PERENCANAAN YANG DISUSUN HARUS MEMILIKI ARAH DAN TUJUAN YANG JELAS DAN MAMPU MENJADI PEDOMAN DAN PENDORONG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

KARENA ITU PULA KE DEPAN PERLU DIWUJUDKAN KONSISTENSI PERENCANAAN MELALUI KETERPADUAN ANTAR BERBAGAI PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DI DALAM DAN LUAR DAERAH DALAM KERANGKA MENCiptakan SINKRONISASI DAN SINERGITAS PERENCANAAN TERSEBUT. UPAYA YANG MESTI DILAKUKAN ADALAH MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN. KOORDINASI ADALAH PERSOALAN YANG CUKUP RUMIT TERUTAMA DALAM PROSES PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN, TATAPI UPAYA INI HARUS SELALU DITINGKATKAN UNTUK SUATU HASIL YANG DIINGINKAN.

BERKAITAN DENGAN ITU, SECARA INTERNAL PERLU DILAKUKAN UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERENCANAAN MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANA. UPAYA INI DILAKUKAN MELALUI PENINGKATAN INTENSITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN. DI SAMPING ITU KE DEPAN PERLU DIKEMBANGKAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA SEHINGGA PENYUSUNAN PERENCANAAN TIDAK LAGI DIBEBANKAN KEPADA PEJABAT STRUKTURAL TETAPI DISERAHKAN KEPADA PEJABAT YANG DIKHUSUSKAN DAN BERKOMPETEN UNTUK PEKERJAAN PENGOLAHAN DATA, INFORMASI DAN ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

UNTUK Mendapatkan SUATU PRODUK PERENCANAAN YANG BERKUALITAS DIPERLUKAN PULA DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN YANG MEMADAI. DATA YANG DIBUTUHKAN ADALAH DATA AKTUAL DENGAN VALIDITAS DAN AKURASI YANG TINGGI SERTA KERAGAMAN DATA YANG TINGGI PULA. OLEH KARENANYA KEGIATAN-KEGIATAN PENDATAAN, SURVEI, EVALUASI DAN MONITORING HASIL PEMBANGUNAN PERLU DITINGKATKAN. MONITORING DAN EVALUASI DILAKUKAN UNTUK MENILAI SEJAUH MANA EFEKTIFITAS SEBUAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN UNTUK DIJADIKAN PEDOMAN BAGI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DI MASA BERIKUTNYA.

PADA ASPEK PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT PERLU DITINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN, SEHINGGA PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN SELURUH STAKEHOLDER DAPAT DIAKOMODASI DENGAN BAIK. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG SEHARUS DILAKSANAKAN SECARA TERATUR DAN KONSISTEN MULAI DARI MUSRENBANG TINGKAT DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN. OLEH KARENA ITU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERLU DITATA SECARA BAIK DENGAN DUKUNGAN REGULASI BERUPA PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG MEMADAI.

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN DI TINGKAT DESA MAUPUN KECAMATAN DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERLU DITINGKATKAN PULA SUMBER DAYA APARATUR PERENCANAANNYA. PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR PERENCANAAN INI DILAKUKAN MELALUI PELATIHAN DAN SOSIALISASI DALAM KERANGKA MENYAMAKAN PERSEPSI DAN METODOLOGI PENYUSUNAN PERENCANAAN, SEHINGGA PERENCANAAN YANG DIUSULKAN ATAU DIHASILKAN DARI MASING MASING TINGKATAN TERSEBUT SINKRON DAN SALING MENDUKUNG.

DI SAMPING ITU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, PERENCANAAN YANG DISUSUN HARUS MEMPERTIMBANGKAN DAYA DUKUNG DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN. HAL INI BERARTI BAHWA PERENCANAAN YANG DISUSUN TIDAK KONTRA PRODUKTIF DENGAN KONSERVASI LINGKUNGAN. KARENA BAGAIMAPUN JUGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN SELAMA INI LEBIH BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN EKONOMI TANPA MEMPERHITUNGGAN DAMPAK NEGATIFNYA TERHADAP LINGKUNGAN, SEHINGGA KUALITAS LINGKUNGAN MENURUN.

KEMUDIAN DARI PADA ITU DALAM UPAYA KE DEPAN DIPERLUKAN PERBAIKAN DAN KUALITAS METODE PERENCANAAN. PERUMUSAN MASALAH DAN SOLUSINYA HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN METODE PERENCANAAN DAN STUDI YANG MEMADAI. BEBERAPA METODE ANALISIS HARUS DIPERDALAM, DIKEMBANGKAN SERTA DISOSIALISASIKAN KEPADA APARAT YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN. DIANTARANYA ADALAH ANALISIS POHON MASALAH (PROBLEM TREE ANALYSIS), ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT) DAN STUDI KELAYAKAN (BENEFIT COST ANALYSIS). KEGAGALAN BEBERAPA KEGIATAN PEMBANGUNAN, BAIK PEMBANGUNAN SOSIAL MAUPUN FISIK SEDIKIT BANYAK DISEBABKAN OLEH TIDAK ADANYA STUDI DAN ANALISIS YANG MATANG DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM.

SELANJUTNYA PEKERJAAN PERENCANAAN ADALAH PEKERJAAN INTELEKTUAL DAN PEMIKIRAN YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN FASILITAS DAN PERALATAN YANG MEMADAI. FASILITAS-FASILITAS TERSEBUT BERUPA PERALATAN KOMPUTER DAN PROGRAM-PROGRAM ANALISIS DATA SECARA ELETRONIK. DI SAMPING ITU DIPERLUKAN PULA DUKUNGAN RUANG KERJA YANG NYAMAN. KE DEPAN PEMBENAHAN SERTA PENINGKATAN FASILITAS INI PERLU DITINGKATKAN PULA DALAM RANGKA MENGHASILKAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN.

DI ATAS SEMUA ITU ADA SUATU HAL YANG SANGAT DIPERLUKAN UNTUK MENJAMIN AGAR PERENCANAAN YANG DIHASILKAN BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA YAITU ADANYA DUKUNGAN POLITIS UNTUK MENERAPKAN RENCANA YANG SUDAH DISUSUN ITU. DUKUNGAN INI HARUS DIBERIKAN OLEH SEMUA PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH, TERUTAMA MASYARAKAT DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH. KARENA TANPA DUKUNGAN SEPerti ITU, SEBAIK APAPUN RENCANA YANG DISUSUN TIDAK AKAN BERPENGARUH BANYAK TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. *Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli*

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif serta produktif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli dalam jangka panjang.

Mengacu kepada Konsepsi diatas dan mempedomani Visi Kota Gunungsitoli, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Kota Gunungsitoli dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam suatu rencana strategis. Oleh karena itu, Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli adalah :

VISI:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA GUNUNGSITOLI YANG BERWAWASAN
KEBANGSAAN, RUKUN ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN RAS,
DEMOKTRATIS DAN KONDUSIF**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan rumusan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan KesbangPol Kota Gunungsitoli sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Badan Kesbang Pol, masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan

peran Badan Kesbang Pol dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan daerah di bidang perencanaan.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi :

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi SKPD adalah:

1. Pernyataan visi SKPD.
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan kedua informasi tersebut, SKPD mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi SKPD benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.

Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Sehubungan dengan visi di atas maka misi yang hendak dilaksanakan Badan Kesbang Pol selama lima tahun ke depan adalah dengan penekanan kepada peningkatan kualitas penyelenggaraan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Pol ke depan. Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut :

MISI :

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pelatihan, sosialisasi langsung ditengah masyarakat dan pelaksanaan upacara peringatan hari – hari besar nasional;
2. Melaksanakan verifikasi kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap orang asing dan organisasi asing;
4. Memaksimalkan kemitraan kepada FKUB, FKDM, FPK dan KOMINDA dalam mewujudkan dan menjaga situasi yang kondusif di Kota Gunungsitoli;
5. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit masyarakat melalui penyuluhan;
6. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
7. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Gunungsitoli;
8. Melaksanakan pelatihan bela negara kepada masyarakat dan pelajar di Kota Gunungsitoli.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli

Untuk mencapai visi dan misi diatas yang menjadi tujuan dari Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sehingga pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol berlangsung dengan baik dan lancar;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sehingga pelaksanaan tugas Kesbangpol berlangsung dengan baik dan lancar;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang teknis agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Terwujudnya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan keuangan;
5. Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan antar etnis;
6. Menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa;
7. Memantapkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam berpolitik;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini;
9. Terwujudnya Kota Gunungsitoli yang aman dan nyaman;
10. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Tersedianya saran dan prasarana pendukung di Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Meningkatnya kerukunan umat beragama dilingkungan masyarakat serta peningkatan pengetahuan masyarakat akan sosial budaya;
6. Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan;
7. Terciptanya kemampuan masyarakat akan budaya politik, kesadaran berbangsa dan bernegara;
8. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dini bencana alam;
9. Peningkatan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
10. Meningkatnya antisipasi dan pencegahan terhadap hal-hal yang berdampak buruk bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - III				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP ADMINISTRASI PERKANTORAN SEHINGGA PELAKSANAAN TUGAS BADAN KESBANGPOL BERLANGSUNG DENGAN BAIK DAN LANCAR	TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UNTUK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAYANAN TERHADAP ADMINISTRASI PERKANTORAN	70.00 %	75.00 %	80.00 %	85.00 %	90.00 %
2	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG SEHINGGA PELAKSANAAN TUGAS KESBANGPOL BERLANGSUNG DENGAN BAIK DAN LANCAR	TERSEDIANYA SARAN DAN PRASARANA PENDUKUNG DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERALATAN KERJA, PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN GEDUNG KANTOR	45.00%	65.00%	75.00%	80.00%	85.00%

3	MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DI BIDANG TEKNIS AGAR DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIBIDANG KESATAUN BANGSA DAN POLITIK	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	MENGIKUTI DIKLAT KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, WASBANG DAN INTELIJEN	65.00%	70.00%	80.00%	85.00%	90.00%
4	Terwujudnya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Penetapan Renstra SKPD b. Penetapan Renja SKPD c. Penyusunan LAKIP d. Penetapan Kinerja	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%
5	Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan antar etnis	Meningkatnya kerukunan umat beragama dilingkungan masyarakat serta peningkatan pengetahuan masyarakat akan sosial budaya	PEMBERDAYAAN LEMBAGA FKUB, FKDM DAN FPK DI KOTA GUNUNGSITOLI	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	95.00%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa	Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	TERWUJUDNYA PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI PERINGATAN HARI – HARI BESAR NASIONAL, SOSIALISASI 4 PILAR DAN BELA NEGARA	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%
7	MEMANTAPKAN WAWASAN DAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM BERPOLITIK	TERCIPTANYA KEMAMPUAN MASYARAKAT AKAN BUDAYA POLITIK, KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	SOSIALISASI BAGI PARTAI POLITIK, MASYARAKAT SERTA PELAJAR	75.00%	80.00%	83.00%	85.00%	90.00%
8	MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA	PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DINI BENCANA ALAM	PELAKSANAAN SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN DAN	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	80.00%

	KEWASPADAN DINI		PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM					
9	TERWUJUDNYA KOTA GUNUNGSITOLI YANG AMAN DAN NYAMAN	PENINGKATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%
10.	TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	MENINGKATNYA ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN TERHADAP HAL-HAL YANG BERDAMPAK BURUK BAGI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	BERFUNGSIONYA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DAN TIM PORA DI KOTA GUNUNGSITOLI	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peningkatan dan pemahaman aparatur melalui diklat dan peningkatan jenjang pendidikan.
2. Penata sistem keorganisasian Pemerintah Daerah melalui penajaman tupoksi dan kewenangan masing – masing.
3. Menyusun regulasi dalam bentuk Perda, Perwal sebagai pengejawantahan pelaksanaan kewenangan Daerah Otonom.
4. Membangun dan menata sistem hubungan sosial yang dinamis.
5. Mendorong masyarakat untuk menghargai dan mencintai bangsa dan negara sendiri.

Adapun strategi yang diambil untuk menjalankan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah.
2. Mengembangkan dan membina serta memberdayakan struktur organisasi Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatkan penyediaan dan kualitas regulasi di daerah.
4. Menciptakan hubungan sosial yang dinamis di tengah masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam matrik renstra Badan KesbangPol ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2016), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2016 – 2021 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kota Gunungsitoli. Namun nomenklatur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol untuk tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA GUNUNGSITOLI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							THN - 1		THN - 2		THN - 3		THN - 4		THN - 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP ADMINISTRASI PERKANTORAN SEHINGGA PELAKSANAAN TUGAS BADAN KESBANGPOL BERLANGSUNG DENGAN BAIK DAN LANCAR	TERLAKSANANYA PELAYANAN TERHADAP ADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAYANAN TERHADAP ADMINISTRASI PERKANTORAN	1910	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	65 %	70 %	354.630.000	75 %	355.339.260	80 %	356.049.939	85 %	391.654.932	90 %	392.438.242	90 %	1.850.112.373	BADAN KESBANGPOL	KOTA GUNUNGSITOLI
				PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	TERPENUHINYA JASA SURAT MENYURAT	65 %	70 %	1.200.000	75%	1.200.000	80%	1.200.000	85%	1.200.000	90%	1.200.000	90%	6.000.000	BADAN KESBANGPOL	KOTA GUNUNGSITOLI
				PENYEDIAAN JASA	TERSEDIA NYA JASA	65 %	70 %	10.000.000	75%	10.000.000	80%	10.000.000	85%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	50.000.000	BADAN KESBANG	KOTA GUNU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

																		POL	NGSIT OLI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

							NG-UNDANGAN	UNDANGAN																	
							PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	TERSEDIA YANG KEBUTUHAN MAKAN DAN MINUM HARIAN PEGAWAI	65 %	70 %	40.000.000	75%	40.000.000	80%	40.000.000	85%	40.000.000	90%	40.000.000	90%	200.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSIOLI		
							RAPAT-KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	TERLAKSANYA KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN KEGIATAN KELUAR DAERAH	65 %	70 %	120.000.000	75%	120.000.000	80%	120.000.000	85%	120.000.000	90%	120.000.000	90%	600.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSIOLI		
							MONITORING/SURVEY/PENGAWASAN/EVALUASI SERTA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	TERLAKSANYA KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM DAERAH	65 %	70 %	50.000.000	75%	50.000.000	80%	50.000.000	85%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	250.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSIOLI		
							PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN KANTOR	TERSEDIA YANG PERALATAN KEBERSIHAN KANTOR	65 %	70 %	1.600.000	75%	1.600.000	80%	1.600.000	85%	1.600.000	90%	1.600.000	90%	8.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSIOLI		
							PENYEDIAAN JASA ADMINIS	TERSEDIA YANG HONORARIU	65 %	70 %	41.100.000	75%	41.100.000	80%	41.100.000	85%	41.100.000	90%	41.100.000	90%	205.500.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSIOLI		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

							RASI UMUM	M PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DENGAN BAIK												OLI				
							PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	TERSEDIA YA JASA KEBERSIHAN KANTOR	65 %	70 %	20.400.000	75%	20.400.000	80%	20.400.000	85%	20.400.000	90%	20.400.000	90%	102.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI	
							PENYEDIAAN JASA SUPIR/KE RNET/OPE RATOR ALAT BERAT	TERSEDIA YA JASA SUPIR	65 %	70 %	22.800.000	75%	22.800.000	80%	22.800.000	85%	22.800.000	90%	22.800.000	90%	114.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI	
							PENYEDIAAN JASA ADMINITRASI KANTOR	TERSEDIA YA JASA ADMINISTRASI KANTOR	65 %	70 %	20.400.000	75%	20.400.000	80%	20.400.000	85%	20.400.000	90%	20.400.000	90%	102.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI	
							PENYEDIAAN JASA KEAMANA HAN KANTOR	TERSEDIA YA JASA KEAMANA HAN KANTOR	65 %	70 %	20.400.000	75%	20.400.000	80%	20.400.000	85%	20.400.000	90%	20.400.000	90%	102.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI	
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG SEHINGGA PELAKSANAAN TUGAS KESBANG POL BERLANGSUNG	TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERALATAN KERJA, PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN GEDUNG KANTOR	1	9	1	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	40 %	45 %	110.370.000	65 %	110.370.000	75 %	110.370.000	80 %	110.370.000	85 %	110.370.000	85 %	575.802.675	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

DENGAN BAIK DAN LANCAR							PENGADAAN PERALAT PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	TERCAPAINYA PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SARANA KANTOR	40 %	45 %	53.913.000	65 %	53.913.000	75 %	53.913.000	80 %	53.913.000	85 %	53.913.000	85 %	269.565.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSILO
							PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN KANTOR	TERLAKSANYA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR	40 %	45 %	10.000.000	65 %	10.000.000	75 %	10.000.000	80 %	10.000.000	85 %	10.000.000	85 %	50.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSILO
							PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN SUKUCADANGAN DAN BBM KENDARAAN	40 %	45 %	40.870.000	65 %	40.870.000	75 %	40.870.000	80 %	40.870.000	85 %	40.870.000	85 %	204.350.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSILO
							PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	TERLAKSANYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	40 %	45 %	10.000.000	65 %	10.000.000	75 %	10.000.000	80 %	10.000.000	85 %	10.000.000	85 %	50.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSILO
MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR	MENIKUITI DIKLAT KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, WASBANG	19	1	03		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBAANGAN KAPASITAS	Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40 %	65 %	50.000.000	70 %	50.100.000	80 %	50.200.200	85 %	55.220.200	90 %	57.981.231	90 %	263.501.651	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSILO

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

R DI BIDANG TEKNIS AGAR DAPAT MEMEBRI KAN PELAYAN AN KEPADA MASYARA KAT DIBIDANG KESATUA N BANGSA DAN POLITIK DAN KEUANGA N	DI BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK	DAN INTELIJEN					S SUMBER DAYA APARATU R																
							MENGIKU TI KEGIATAN DIKLAT / BIMTEK / WORKSH OP/SOSIA LISASI/KU RSUS DI DALAM DAN LUAR DAERAH	MENINGKAT NYA PENGETAH UAN APARATUR SESUAI DENGAN TUPOKSINY A	40%	60%	30.000.0 00	70%	40.000.0 00	80%	50.000.0 00	85%	55.000.0 00	90%	60.000.0 00	90%	235.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
Terwujudn ya penyusuna n laporan pencapaian kinerja dan keuangan Badan Kesbang Pol	Tersusun ya laporan capaian kinerja dan keuangan Badan Kesbang Pol	e. Penetap an Renstra SKPD f. Penetap an Renja SKPD g. Penyus	1 9	1	0 4		PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMB ANGAN SISTEM PELAPOR AN CAPAIAN	Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75 %	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	80 %	10.000.0 00	80 %	10.000.0 00	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

		unan LAKIP h. Penetapan Kinerja				KINERJA DAN KEUANGA N																
						PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	TERSUSUNNYA RENJA, LAKIP, PENETAPAN KINERJA DAN RKA	75%	-	-	-	-	-	-	-	80%	10.000.000	80%	10.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI	
MENCIPTAKAN IKLIM KOMUNIKASI YANG HARMONIS ANTAR TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT DAN ANTAR ETNIS.	MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DILINGKUNGAN MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT AKAN SOSIAL BUDAYA	PEMERDAYAAN LEMBAGA FKUB, FKDM DAN FPK DI KOTA GUNUNGSITOLI	19	1	07	PROGRAM KEMITRAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan	60%	65%	60.000.000	70%	60.120.000	75%	60.240.240	80%	66.264.264	95%	69.577.477	95%	316.201.981	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI
						FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN FORUM	SARASEHAN PENINGKATAN PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMPERKUKAN KERUKUNAN	60%	65%	150.000.000	70%	130.000.000	75%	120.000.000	80%	110.000.000	95%	100.000.000	95%	610.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

						KERUKUN AN UMAT BERAGAMA A (FKUB) KOTA GUNUNGS ITOLI	N UMAT BERAGAMA															
						FASILITAS I PENINGKAT AN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN FORUM KEWASPA DAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KOTA GUNUNGS ITOLI	TERFASILIT ASINYA PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN FKDM KOTA GUNUNGSIT OLI	60 %	65 %	30.000.000	70 %	30.000.000	75 %	30.000.000	80 %	30.000.000	95 %	30.000.000	95 %	150.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSIT OLI
						FASILITAS I PENINGKAT AN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN FORUM PEMBAUR AN KEBANGSAAN (FPK) KOTA GUNUNGS ITOLI	TERFASILIT ASINYA PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN FPK KOTA GUNUNGSIT OLI	60 %	65 %	30.000.000	70 %	30.000.000	75 %	30.000.000	80 %	30.000.000	95 %	30.000.000	95 %	150.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSIT OLI
MENGALAH	PENINGKAT	TERWUJUDN	1	1	0	PROGRA	Cakupan	65 %	70 %	255.000.	75 %	255.510.	80 %	256.021.	85 %	281.623.	90 %	295.704.	90 %	1.343.	BADAN	KOTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

NG PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN WAWASAN KEBANGSAAN, PEMBAURUAN, BELA NEGARA DAN KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA	TAN KETERLIBATAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENGEMBAHAN WAWASAN KEBANGSAAN	YA PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI PERINGATAN HARI – HARI BESAR NASIONAL, SOSIALISASI 4 PILAR DAN BELA NEGARA	9		6	M PENGEMBAN ANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan			000		000		020		122		278		858.420	KESBANG POL	GUNU NGSIT OLI
						PERINGATAN HARI ULANG TAHUN RI	TERSELENG GARANYA PERAYAAN HUT RI DI KOTA GUNUNGSIT OLI	65 %	70 %	150.000. 000	75 %	150.000. 000	80 %	150.000. 000	85 %	150.000. 000	90 %	150.000. 000	90 %	750.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	UPACARA BENDERA TANGGAL 17 SETIAP BULAN BERKENAN DI KOTA GUNUNGSIT OLI	65 %	70 %	20.000.0 00	75 %	20.000.0 00	80 %	20.000.0 00	85 %	20.000.0 00	90 %	20.000.0 00	90 %	100.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						MELAKSANAKAN UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA	TERSELENG GARANYA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI KOTA GUNUNGSIT OLI	65 %	70 %	15.000.0 00	75 %	15.000.0 00	80 %	15.000.0 00	85 %	15.000.0 00	90 %	15.000.0 00	90 %	75.000.0 00	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

						MELAKSA NAKAN UPACARA HARI KEBANGKI TAN NASIONAL	TERSELENG GARANYA PERINGATA N HARI KEBANGKIT AN NASIONAL DI KOTA GUNUNGSIT OLI	65 %	70 %	10.000.0 00	75 %	10.000.0 00	80 %	10.000.0 00	85 %	10.000.0 00	90 %	10.000.0 00	90 %	50.000.0 00	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						MELAKSA NAKAN UPACARA HARI LAHIRNYA PANCASIL A	TERSELENG GARANYA PERINGATA N HARI LAHIRNYA PANCASIL DI KOTA GUNUNGSIT OLI	65 %	70 %	20.000.0 00	75 %	20.000.0 00	80 %	20.000.0 00	85 %	20.000.0 00	90 %	20.000.0 00	90 %	100.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						PENDIKIK AN BELA NEGARA	TERLAKSAN ANYA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENYULUHA N BELA NEGARA BAGI PELAJAR DI KOTA GUNUNGSIT OLI	65 %	70 %	40.000.0 00	75 %	40.000.0 00	80 %	40.000.0 00	85 %	40.000.0 00	90 %	40.000.0 00	90 %	150.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						SOSIALI SASI 4 (EMPAT) PILAR KEBANG SAAN	TERLAKSA NANYA SOSIALISA SI PEMANTA PAN 4 (EMPAT) PILAR WAWASAN KEBANGS AAN DI	65 %	70 %	30.000.0 00	75 %	30.000.0 00	80 %	30.000.0 00	85 %	30.000.0 00	90 %	30.000.0 00	90 %	150.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

MEMANTAP KAN WAWASAN DAN KESADARA N BERBANGS A DAN BERNEGAR DALAM BERPOLIT IK	TERCIPTAN YA KEMAMPUA N MASYARAK AT AKAN BUDAYA POLITIK, KESADARA N BERBANGS A DAN BERNEGAR A.	SOSIALISA SI BAGI PARTAI POLITIK, MASYARAK AT SERTA PELAJAR	1 9	1	0 9	PROGRA M PENDIDIK AN POLITIK MASYARA KAT	KOTA GUNUNGS ITOLI Cakupan Peningkata n Pemahama n Masyarakat Dalam Bidang Politik	65 %	75 %	80.000.0 00	80 %	80.160.0 00	83 %	80.320.3 20	85 %	88.352.3 52	90 %	92.769.9 70	90 %	421.602. 642	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						PEMBINAA N PARTAI POLITIK	TERLAKSAN ANYA SOSIALISASI PERKA BPK NO. 2 TAHUN 2015 KEPADA PARTAI POLITIK DI WILAYAH KOTA GUNUNGSIT OLI	65 %	75 %	30.000.0 00	80 %	30.000.0 00	83 %	30.000.0 00	85 %	30.000.0 00	90 %	30.000.0 00	90 %	150.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						PEMANTA PAN STABILITA S SOSIAL POLITIK	TERSELENG GARANYA SOSIALISASI DAN PEMBINAAN POLITIK BAGI MASYARAK AT DAN PELAJAR	65 %	75 %	30.000.0 00	80 %	30.000.0 00	83 %	30.000.0 00	85 %	30.000.0 00	90 %	30.000.0 00	90 %	150.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
						VERIFIKA	TERSUSUN	65 %	75 %	50.000.0	80 %	50.000.0	83 %	50.000.0	85 %	50.000.0	90 %	50.000.0	90 %	250.000.	BADAN	KOTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

							SI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL	NYA LAPORAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KOTA GUNUNGSITOLI			00		00		00		00	000	KESBANG POL	GUNUNGSITOLI			
							PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH	TERSUSUNNYA LAPORAN HASIL EVALUASI PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH DI KOTA GUNUNGSITOLI	65 %	75 %	20.000.000	80 %	20.000.000	83 %	20.000.000	85 %	20.000.000	90 %	20.000.000	90 %	100.000.000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA KEWASPADAAN DANI	PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	PELAKSANAAN SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	9	1	0	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	10 %	15 %	25.000.000	20 %	25.050.000	25 %	25.100.100	30 %	27.610.110	80 %	28.990.616	80 %	131.750.826	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNUNGSITOLI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

	BENCANA ALAM						SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN DINI BENCANA ALAM DI KOTA GUNUNGSITOLI	MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN DINI BENCANA ALAM DI KOTA GUNUNGSITOLI	10 %	15 %	25.000.000	20 %	25.050.000	25 %	25.100.100	30 %	27.610.110	80 %	28.990.616	80 %	131.750.826	BADAN KESBANGPOL	KOTA GUNUNGSITOLI
TERWUJUDNYA KOTA GUNUNGSITOLI YANG AMAN DAN NYAMAN	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	19	1	08		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rasio Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	50 %	65 %	220.000.000	70 %	220.440.000	75 %	220.880.880	80 %	242.968.968	85 %	255.117.416	85 %	1.159.407.264	BADAN KESBANGPOL	KOTA GUNUNGSITOLI
							PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA GUNUNGSITOLI	TERLAKSANYA FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA GUNUNGSITOLI	50 %	65 %	20.000.000	70 %	40.000.000	75 %	60.000.000	80 %	80.000.000	85 %	100.000.000	85 %	300.000.000	BADAN KESBANGPOL	KOTA GUNUNGSITOLI
Terwujudn	Meningkat	Berfungsiny	1	1	0		PROGRA	Cakupan	50 %	65 %	220.000.	70 %	220.440.	75 %	220.880.	80 %	242.968.	85 %	255.117.	85 %	1.159.	BADAN	KOTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016 - 2021

ya Keamanan dan kenyaman an lingkungan	nya Antisipasi dan Pencegah an Terhadap hal-hal yang Berdampa k Buruk bagi Ketentram an dan Ketertiban Masyarak at	a Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Tim Pora di Kota Gunungsitoli	9		5		M PENINGK ATAN KEAMANA N DAN KENYAMA NAN LINGKUN GAN	Keamanan dan Kenyaman an Lingkungan			000		000		880		968		416		407.264	KESBANG POL	GUNU NGSIT OLI
							PENGEMB ANGAN KOMUNIT AS INTELEJE N DAERAH (KOMINDA)	BERFUNGSI NYA KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA) DI KOTA GUNUNGSIT OLI	50 %	65 %	20.000.0 00	70 %	40.000.0 00	75 %	60.000.0 00	80 %	80.000.0 00	85 %	100.000. 000	85 %	300.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI
							PEMANTA UAN AKTIVITAS ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING	TERPANTAU DAN TERIDENTIFI KASINYA BERBAGAI AKTIVITAS DAN PEMASALAH AN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING	50 %	65 %	20.000.0 00	70 %	40.000.0 00	75 %	60.000.0 00	80 %	80.000.0 00	85 %	100.000. 000	85 %	300.000. 000	BADAN KESBANG POL	KOTA GUNU NGSIT OLI

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra Badan Kesbang Pol ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Badan Kesbang Pol. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	65.00%	70.00 %	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%
2.	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.00%	45.00%	65.00%	75.00%	80.00%	85.00%	85.00%
3.	Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.00%	65.00%	70.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%
4.	Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
5.	Cakupan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	85.00%
6.	Cakupan Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%
7.	Cakupan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	95.00%	95.00%
8.	Rasio Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	50.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	85.00%
9.	Cakupan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Bidang Politik	65.00%	75.00%	80.00%	83.00%	85.00%	90.00%	90.00%
10.	Cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	80.00%	80.00%